

PENINGKATAN PERAN KUD DALAM SISTIM DISTRIBUSI PUPUK

Mandala Harefa *)

Abstract

The Majority of Indonesian population, which work in agriculture sector, need so fertilizer. Fertilizer is one of important input in the food productions proses. So far, fertilizer is produced by 6 factories. But, recently, we often hear about difficulty in getting fertilizer or there is fertilizer scarcity in the market. PT. PUSRI is coordinator of the 6 factories for distributing fertilizer from linie I to linie III. Meanwhile, KUD is distribution excutor from linie III to linie IV. The long distribution system made unefficcient and many distortion. The problem need an analysis in the effort to improve the KUD rate, so there is fertilizer scarcity and to prepare itself to face the free market era.

PENDAHULUAN

Bila kita berbicara tentang pupuk, sebenarnya kita membicarakan masalah nasional. Alasannya, karena jumlah petani sebagai konsumen pupuk, yang berdomisili di pulau Jawa berjumlah 24,3 juta orang pada tahun 1994 dari sekitar 40,1 juta petani di Indonesia. Sedangkan jumlah produksi beras di pulau Jawa sekitar 64% dari total produksi nasional. Pupuk merupakan salah satu input penting dalam menghasilkan beras. Porsi pupuk urea dalam 1 Ha adalah 310 Kg pupuk (Departemen Pertanian 1995). Dengan gambaran di atas maka masalah dalam peredaran atau kelangkaan pupuk adalah masalah kita semua.

Selanjutnya jika terjadi penurunan produksi, Indonesia akan mengimpor sekitar 1 juta ton beras, sehingga total impor akan mencapai

*) Penulis adalah Peneliti bidang Ekonomi pada Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI

3 juta ton pada tahun 1996. Dengan adanya impor 1 juta ton diatas, maka memerlukan devisa sekitar US\$ 415 juta atau Rp.950 miliar. Akibatnya, defisit neraca transaksi berjalan dan inflasi Indonesia akan semakin meningkat sehingga beresiko cukup besar terhadap perekonomian Nasional.

PERMASALAHAN

Selama ini pasokan pupuk secara nasional sebenarnya tidak menjadi masalah. Berdasarkan data Depperindag, petani sebenarnya tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk. Hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah produksi pupuk yang dipasok oleh 6 pabrik pupuk lebih dari cukup. Untuk tahun 1995 total produksi pupuk yang didistribusikan mencapai 5,9 juta ton, sedangkan kebutuhan petani seluruh Indonesia hanya sekitar 4,0 juta ton (lihat Tabel.I). Jadi, terjadinya kelangkaan pupuk atau tidak sampainya pupuk tersebut ke petani tampaknya disebabkan adanya permasalahan pada saluran distribusinya.

TABEL I
PERKEMBANGAN PRODUKSI PUPUK UREA MENURUT PRODUSEN
(TON)

PRODUSEN	KAPASITAS PRODUKSI	REALISASI		RENCANA 1996
		1994	1995	
PT PUSRI	2.280.000	1.419.745	2.036.760	2.191.000
PT PUPUK KUJANG	570.000	536.325	607.803	598.500
PT PUPUK KALTIM	1.841.000	1.815.044	1.710.000	1.710.000
PT PUPUK ISKANDAR MUDA	656.000	670.245	600.044	600.000
PT AAF	627.000	547.891	567.949	627.000
PT PETROKIMIA	462.000	462.000	368.848	420.000
TOTAL	6.436.000	4.916.495	5.891.040	6.146.500

Sumber : Depperindag, 1995

Timbulnya permasalahan distribusi ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai gangguan (distorsi), seperti kewajiban beberapa daerah untuk menggunakan pupuk tablet. Kewajiban tersebut tidak diimbangi oleh penambahan pasokan pupuk pril, karena proses pupuk tablet merupakan konversi dari pupuk pril. ¹⁾ Seharusnya produksi pupuk tablet tidak mengganggu persediaan pupuk pril tersebut, karena produksi pabrik

1.) ECONITS Public Policy Review, "Dampak Kelangkaan Semu Pupuk Terhadap Impor Beras dan Kesejahteraan Petani Tahun 1996", Jakarta Februari 1996.

pupuk Indonesia belum mencapai kapasitas penuh, yakni sekitar 6,4 ton.

Situasi yang terjadi disini menyangkut dua aspek, yaitu : (a) aspek harga dan (b) aspek volume. Teori ekonomi mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tersebut, dan kemudian menentukan faktor-faktor mana yang bisa mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, sehingga pemerintah bisa "mengendalikan" situasi pasar sesuai dengan apa yang diinginkan.²⁾

TABEL II
PENGADAAN DAN KEBUTUHAN PUPUK UREA MENURUT PRODUSEN
(Bulan Februari - Maret 1996)

Bulan	Stok Awal	Pengadaan Pabrik	Jumlah Pengadaan	Jumlah Kebutuhan	Stok Akhir
(1)	(2)	(3)	(2+3)=4	(5)	(4-5)=6
Februari	317.298	330.670	647.968	266.638	381.330
Maret*)	381.330	397.032	778.362	234.136	544.228
April*)	544.228	370.000	914.228	398.538	515.688
Mei*)	515.688	300.000	815.688	396.515	419.173

Sumber: Depperindag

Catatan :*)Februari realisasi, Maret - Mei 1996 Rencana

Kelangkaan pupuk bisa pula terjadi oleh karena adanya ekspor pupuk. Hal ini diakibatkan oleh selisih harga pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Seperti diketahui harga eceran tertinggi di dalam negeri sekitar US\$ 174/ton, sedangkan di pasar International sekitar US\$ 205/ton. Kenyataan ini akan menggiurkan pedagang untuk membeli dari KUD, dan menjualnya keluar negeri. Di samping itu ada beberapa ulah oknum KUD yang memperoleh kemudahan dan keuntungan dengan menjual surat delivery order (DO) untuk mengambil pupuk di gudang.

Praktek ini diakibatkan oleh penetapan harga eceran tertinggi HET pupuk yang dilakukan pemerintah. Pemerintah menetapkan harga dan lembaga yang bertanggung jawab untuk pendistribusian pupuk produksi dalam negeri untuk pertanian, melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 296/KMK.016/1996 tanggal 24 April 1996 dan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.38/MPP/Kep/3/1996. Pertimbangan pemerintah adalah untuk pengendalian harga pupuk yang

sesuai HET agar terjangkau oleh petani dan kelancaran pengadaan dan penyaluran termasuk juga perhitungan subsidi pupuk urea. Sementara itu lembaga yang juga berperan dalam mendistribusikan pupuk, seperti KUD pengecer memperoleh kenaikan fee dari Rp 2,1 menjadi Rp 2,7 per Kg, biaya untuk distribusi dari Rp 9,2 menjadi Rp 10,8 per Kg serta fee KUD pengecer terdapat semacam potongan dari Rp 6 menjadi Rp 7,5 per Kg. Namun dalam kenyataannya banyak diantara petani yang membeli pupuk dua kali lipat dari harga eceran tertinggi, karena langkanya pupuk.³⁾

Dalam upaya menjamin tersedianya pupuk pada waktu masa tanam maka dikeluarkan SK Menteri Perdagangan No.61/KP/II/1988 untuk mengatur distribusi pupuk dengan penanggung jawabnya adalah PT.PUSRI dan PT Pertani. Sedangkan untuk lini III dan IV, KUD yang bertanggung jawab sebagai distributor dan PT Pertani menjadi penyalur. Dalam SK ini disebutkan juga Penyalur di luar KUD dan rencana pengurangan peran PT Pertani dan akan meningkatkan peran KUD. Dengan SK ini, pemerintah mendukung peran KUD dari mulai lini III dan memberikan bantuan berupa bantuan Kredit Modal Kerja (KMK). Hal ini diatur dalam SK Menteri Perdagangan No. 60/KP/IV /1989 dimana peran dan tanggung jawab distributor untuk penyediaan pupuk diserahkan dari lini III ke lini IV yang di serahkan kepada PT Pusri dan PT Pertani.

Sedangkan SK Menteri Perdagangan No. 182 tahun 1995 diatur mengenai minimal stok pupuk untuk satu wilayah adalah wilayah A yang meliputi daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Timur dan Bali jumlah stok minimal jumlahnya setengah dari kebutuhan berikutnya, wilayah B yang meliputi daerah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung dan Sulawesi Selatan jumlah stoknya minimal satu bulan kemudian berikutnya, sedangkan wilayah C terdiri dari daerah: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Irian, NTB, NTT dan Timor Timur stoknya dua bulan untuk kebutuhan berikutnya dimana tanggung jawab pen-distribusian tetap diserahkan pada PT Pusri.

Dari sisi teoritis, campur tangan pemerintah bisa dibenarkan. Kaum klasik menyetujui adanya dua macam campur tangan pemerintah di bidang ekonomi, selain bidang-bidang pertahanan, hukum, kepamongprajaan, yang satu pada tingkat "mikro" dan yang lain pada tingkat "makro". Campur tangan pada tingkat mikro menyangkut pengaturan-pengaturan atas industri-industri yang bersifat monopoli dan penghapusan

hambatan-hambatan kelembagaan yang menghalangi fleksibilitas harga-harga (turun atau naik) sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Tindakan-tindakan seperti ini dianggap akan membantu proses penyesuaian alamiah tersebut. Campur tangan yang kedua, yang menyangkut tingkat "makro", adalah tindakan pengaturan terhadap jumlah uang yang beredar.⁴⁾

METODOLOGI

Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis deskriptif/kualitatif yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh para petani dalam memperoleh pupuk melalui KUD. Sedangkan data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari publikasi-publikasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, PT Pusri, Laporan penelitian Econit Advisory ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, majalah Warta Ekonomi, Pusat data bisnis Indonesia, Surat kabar, serta Kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dalam penyaluran distribusi pupuk yang berakibat terjadi kelangkaan pupuk.

TINJAUAN TEORITIS

Keputusan pemasaran, tidak terkecuali sistem distribusi, sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan pemerintahan. Lingkungan ini terdiri dari hukum, Badan Pemerintah dan kelompok berpengaruh yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat. Suatu pembahasan atas kecenderungan politik utama dan implikasinya terhadap manajemen pemasaran. Pengaturan bisnis mempunyai sejumlah maksud, terutama untuk produksi yang sangat strategis yang sangat dibutuhkan oleh sejumlah masyarakat banyak.

Adapun maksud dari pengaturan distribusi adalah, pertama, untuk melindungi perusahaan. Eksekutif bisnis semuanya menyetujui persaingan tetapi akan berusaha menetralsirnya bila persaingan menyentuh mereka. Jika merasa terancam, beberapa diantaranya menggunakan penetapan harga yang sangat agresif, promosi, atau usaha-usaha untuk mengamankan distribusi. Jadi instrumen hukum dikeluarkan guna menentukan dan mencegah persaingan yang tidak jujur. Kedua, untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendalikan. Mungkin saja terjadi keadaan di mana produk nasional

4) DR. Boediono, *Ekonomi Makro*, BPFE Yogyakarta, Edisi Ke. VIII, 1990, Hal 25)

bruto suatu negara meningkat tetapi kualitas hidupnya menurun.⁵⁾ Sitem distribusi adalah sumber daya eksternal yang utama. Biasanya perlu bertahun-tahun untuk membangunnya, dan tidak dapat diubah dengan mudah. Sitem ini sama pentingnya dengan sumber daya internal utama lainnya seperti produksi, riset, rekayasa, dan personil penjualan serta fasilitas lapangan. Sitem ini menggambarkan komitmen sejumlah besar perusahaan independen yang bisnisnya adalah distribusi dan terhadap pasar tertentu yang mereka layani. Sitem distribusi juga menggambarkan komitmen terhadap seperangkat kebijakan dan praktek yang merupakan bahan dasar untuk disusun menjadi suatu hubungan jangka panjang yang luas.⁶⁾

Hampir sebagian besar produsen bekerja sama dengan beberapa perantara pemasaran untuk membawa produk mereka ke pasar dan pengguna akhir. Perantara membentuk satu sitem distribusi yang solid agar pasokan barang terjamin sesuai dengan jumlah, waktu dan tempat yang dibutuhkan. Seperti yang diungkapkan oleh Stern dan El-ansary, bahwa saluran distribusi dapat dilihat sebagai sekumpulan organisasi independen yang terlibat dalam proses pembuatan suatu produk yang tersedia untuk digunakan sebagai input.⁷⁾

Jadi, tujuan akhir distribusi adalah pencapaian barang kepada pemakai terakhir. Tanpa adanya pemilihan sitem distribusi yang tepat, maka kegiatan penyaluran barang-barang oleh suatu lembaga yang disertai tanggung jawab, tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Akibat kesalahan dalam menetapkan suatu sitem distribusi yang sesuai dengan jenis barang, maka akan terganggu output suatu usaha apabila barang tersebut merupakan input penting. Tentunya hal ini harus memperhatikan dan mengantisipasi faktor-faktor yang tidak diduga dalam proses pendistribusian. Jadi, fungsi distribusi adalah untuk memudahkan para konsumen untuk memperoleh kebutuhan apa yang diinginkan pada saat yang diperlukan. Jadi, titik berat dari sitem pendistribusian adalah menitik beratkan peranan dari lembaga-lembaga dalam proses penyampaian barang.

5) Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Buku I, BAB. 6, Terjemah oleh Ancella Anitawati Herawan, Salemba Empat - Prentice Hall, Jakarta, Tahun 1995, Hal. 193.

6) Philip Kotler *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, Buku Ke. II, BAB. 20, Menyeleksi dan mengelola Saluran Pemasaran, Terjemahan Oleh Ancella Anitawati Herawan, Salemba Empat - Prentice Hall, Jakarta 1995, Hal. 622*

7) Ibid, Hal. 623

Hal tersebut juga dapat dilihat dari fungsi distribusi yang dikemukakan Winardi, yaitu fungsi distribusi adalah memindahkan dan menyimpan persediaan, mengusahakan agar produk atau barang yang tersedia pada tempat yang diperlukan oleh produksi dan konsumen pada saat timbulnya kebutuhan.⁸⁾

Ada berbagai bentuk saluran distribusi yang dapat dipakai dalam upaya menyalurkan produk oleh suatu lembaga yang menghasilkan suatu barang yang dibutuhkan untuk disampaikan ke pengguna akhir, yaitu :

1. *A zero-level channel*, yang terdiri dari lembaga yang menjual secara langsung kepada konsumen akhir dengan tidak ada pedagang perantara.
2. *A one-level channel*, sistem distribusi ini hanya terdiri dari satu perantara atau middleman dari produsen ke konsumen akhir.
3. *A Two level channel*. Ada dua perantara yang terdiri dari wholesaler dan retailer. Jadi perusahaan yang memproduksi suatu barang tidak melakukan penyaluran sendiri, tetapi menyerahkan penyaluran barang hasil produksinya kepada wholesaler
4. *A Three level channel*. Ini merupakan pendistribusian yang panjang, karena terdapat tiga tingkatan middleman antar produsen ke konsumen akhir. Wholesaler merupakan sebuah lembaga distribusi yang melakukan pembelian dalam partai besar. Kemudian, Jobber melakukan pembelian dari wholesaler yang menjualnya ke retailer, yang tidak dapat dilayani oleh Wholesaler dan retailer akan menjualnya ke pengguna terakhir.⁹⁾ (Lihat gambar)

JENIS-JENIS PENDISTRIBUSIAN

ZERO-LEVEL CHANNEL (M-C) MANUFACTUR-----> CUSTOMER

ONE-LEVEL CHANNEL (M-R-C) MANUFACTUR----->RETAILER-----> CUSTOMER

TWO-LEVEL CHANNEL (M-W-R-C) MANUFACTUR-->WHOLE--> RETAILER--> CUSTOMER
SALER

THREE-LEVEL CHANNEL (M-W-J-R-C) MANUFACTUR->WHOLE->JOBBER->RETAI->CUSTOMER
SALER LER

Sumber : Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Second Edition, Prentice Hall International, Inc. Hal. 357

PEMBAHASAN

Panjangnya sistim jaringan distribusi pupuk akan membuka peluang oknum KUD untuk bermain, sehingga sistim pendistribusian ini perlu ditinjau kembali untuk menyempurnakannya. Hasil pemantauan Tim Pangan dan Pupuk FKP DPR-RI beberapa waktu lalu, mengemukakan masalah dengan panjangannya mata rantai birokrasi distribusi menyebabkan petani sulit untuk memperoleh pupuk. Akibatnya petani terpaksa membeli dari kios-kios non-KUD yang harganya jauh lebih mahal ketimbang membeli di koperasi. Kenyataan ini membuka peluang pihak swasta untuk memperoleh keuntungan yang besar.¹⁰⁾

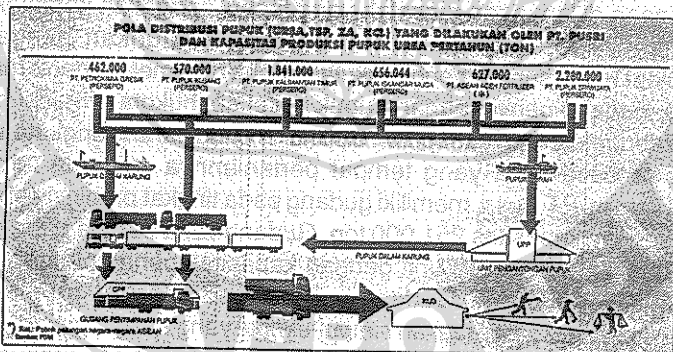
Dalam hal ini , pemerintah menghadapi dilema, pertama, karena produsen pupuk dan petani kurang melakukan penyesuaian. Kedua, bila pemerintah melepaskan harga pupuk menurut harga pasar, ini akan mempertaruhkan nasib jutaan petani. Karena itu, pemerintah akan memproteksinya, namun di sisi lain perlu menghitung biaya dan akibat selanjutnya. Untuk pola distribusi pupuk perlu disempurnakan dengan melibatkan petani dan koperasi unit desa, paling tidak dari lini II sampai IV pada tingkat kecamatan.

Sistim distribusi dan pengadaan pupuk yang diatur oleh pemerintah sudah merupakan ketentuan dalam SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.38/MPP/Kep/3/1996. Dari ketentuan tersebut penanggung jawab dan penyalur pupuk dari pabrik hingga konsumen

10) *Majalah Warta Ekonomi*, Menghilang di Tengah Jalan. No. 45 Th. VII/1, April 1995.

akhir adalah PT. Pusri. PT. Pusri melakukan koordinasi dan bertanggung jawab tidak hanya atas pupuk urea, tetapi juga terhadap jenis pupuk lainnya.

PT. Pusri, sebagai koordinator, harus mengadakan koordinasi dengan 6 pabrik pupuk lainnya untuk mengatur pengadaan, dan menunjuk KUD-KUD penyalur. Sementara itu, Departemen Koperasi sebagai pembina koperasi, mengajukan daftar KUD penyalur yang dianggap mampu dan layak menyalurkan pupuk. Jadi KUD penyalur yang ditunjuk atas usulan dan pertimbangan Dekop itulah yang ditunjuk oleh PT Pusri. Kemudian KUD penyalur menunjuk KUD pengecer yang ada di wilayahnya atas persetujuan PT.Pusri. Kerjasama antara KUD penyalur dengan KUD pengecer diatur berdasarkan suatu kontrak. Sedangkan dana untuk menebus pupuk diatur oleh mekanisme perbankan, yaitu kredit usaha tani melalui BRI. Disini, KUD penyalur bertanggung jawab atas terjaminnya stok pupuk di KUD pengecer. Jika ada permasalahan di KUD pengecer maka KUD penyalur berhak memutuskan kontrak. Hal ini sulit dikontrol oleh PT-Pusri, karena banyaknya KUD yang terlibat dilini ini, namun tidak melibatkan para petani dalam KUD untuk penyaluran pupuk agar sampai ke petani sebelum masa tanam tiba. (Lihat Gambar)



Sumber : Pusat Data Bisnis Indonesia, April 1996

Jadi jelas sekali bila kita melihat SK tersebut, PT Pusri menjamin stok pupuk dari lini I, yaitu gudang wilayah pabrik, ke lini II, gudang di wilayah ibukota propinsi atau unit pengantungan pupuk, sampai ke lini III, gudang wilayah kabupaten. Sedangkan KUD penyalur menjamin dari lini III ke Lini IV, yakni KUD pengecer sampai pada konsumen akhir yaitu para petani.

Pada lini III jumlah stok pupuk minimal dibagi dalam wilayah. Wilayah A meliputi daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali yang jumlah stok minimalnya tersedia untuk satu bulan

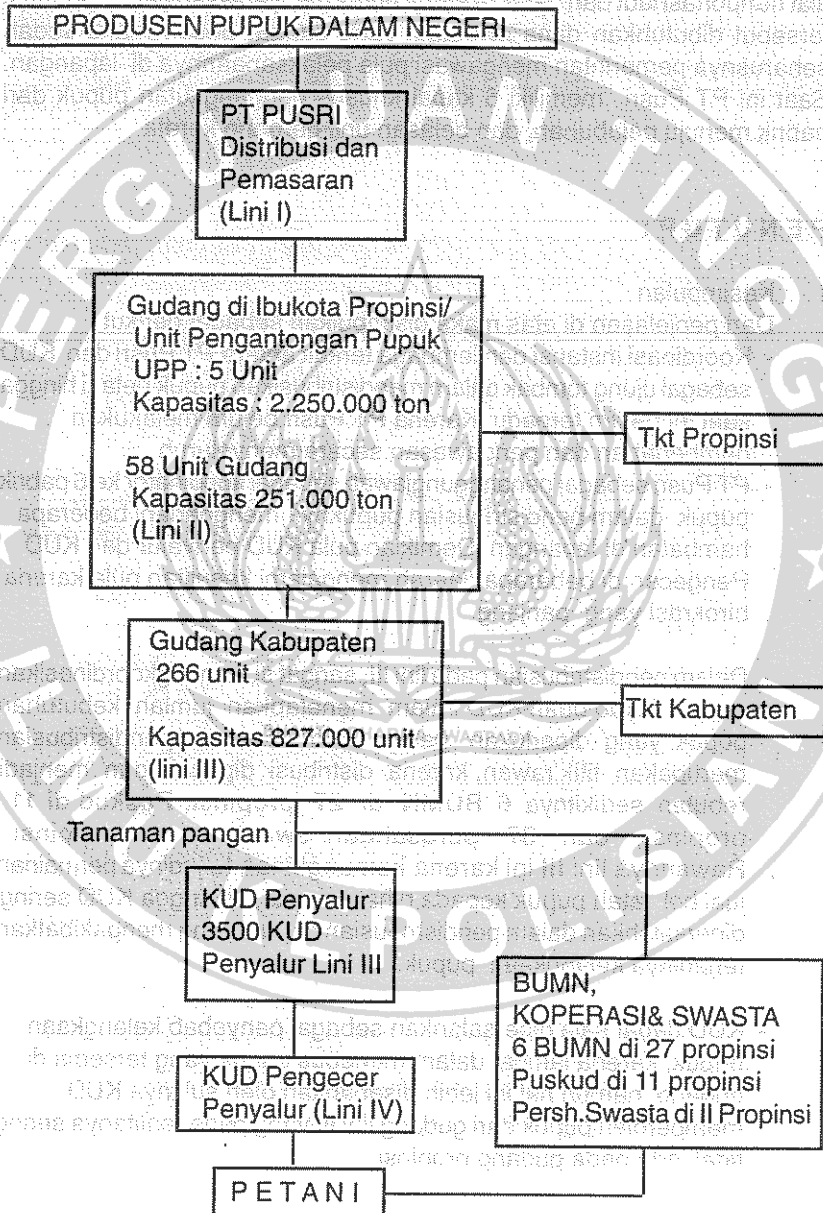
selanjutnya. Wilayah B meliputi daerah: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung dan Sulawesi Selatan, jumlah stok minimal yang harus selalu tersedia untuk kebutuhan 1,5 bulan berikutnya. Sedangkan untuk wilayah C terdiri dari daerah: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Irian, NTB, NTT dan Timor Timur yang persediaan kebutuhan stok minimal untuk 2 bulan selanjutnya. (Lihat Pola distribusi pupuk)

Dengan melihat kondisi yang dikemukakan di atas, sebenarnya dengan jumlah persediaan pupuk yang diproduksi di semua pabrik yang ada tidak menyebabkan terjadinya kelangkaan yang dapat menimbulkan kesulitan bagi petani. Hal tersebut dapat kita lihat dari total produksi dan total kebutuhan pupuk para petani. Dengan mata rantai distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Dalam SK Menperindag tersebut PT Pusri mengkoordinir pabrik pupuk lainnya dalam memproduksi, menyediakan, mendistribusikan dan mengawasi pupuk agar tidak terjadi kekurangan sesuai dengan kebutuhan para petani, yakni tepat jumlah, waktu, tepat harga, dan tepat jenis. Namun dengan kondisi geografis seperti Indonesia bisa saja terjadi, karena dalam pelaksanaan di lapangan masalah yang timbul sangatlah kompleks.

Dalam proses tersebut, tentu sangat dibutuhkan pengadaan infrastruktur untuk sarana pengangkutan pupuk baik melalui darat maupun laut dan gudang penyimpanan pupuk di setiap ibukota propinsi hingga tingkat kabupaten. Dari kabupaten diperlukan pula sarana angkutan untuk sampai ke desa-desa yang tempat pertaniannya mungkin terpencil. Sampai saat ini PT Pusri memiliki gudang pada tingkat propinsi sebanyak 58 unit dengan kapasitas 251.000 ton. Gudang yang berada pada tingkat Kabupaten berjumlah 266 unit dengan kapasitas penampungan pupuk sebanyak 827.000 ton. Gudang-gudang pada tingkat propinsi dan Kabupaten tersebut merupakan simpul-simpul yang sangat rawan, karena setelah itu ada sekitar 3.500 KUD merupakan lembaga yang menyalurkan pupuk ke petani.

Untuk Infrastruktur seperti di atas, pemerintah juga menyediakan alat transportasi laut dan darat. Karena untuk menyediakan alat transportasi tersebut dibutuhkan dana investasi yang sangat besar, maka sudah seharusnya pemerintah mengawasi pula pelaksanaannya di lapangan. Saat ini PT Pusri memiliki 6 kapal khusus pengangkutan pupuk dari pabrik menuju pelabuhan, dan belasan unit gerbong kereta.

POLA DISTRIBUSI PUPUK UREA DI DALAM NEGERI



Untuk Infrastruktur seperti di atas, pemerintah juga menyediakan alat transportasi laut dan darat. Karena untuk menyediakan alat transportasi tersebut dibutuhkan dana investasi yang sangat besar, maka sudah seharusnya pemerintah mengawasi pula pelaksanaannya di lapangan. Saat ini PT Pusri memiliki 6 kapal khusus pengangkutan pupuk dari pabrik menuju pelabuhan, dan belasan unit gerbong kereta.

PENUTUP :

I. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas maka disimpulkan sebagai berikut :

- Koordinasi instansi dan lembaga terkait antara PT Pusri dan KUD sebagai ujung tombak dalam mendistribusikan pupuk petani hingga saat ini belum terpadu. Karena PT Pusri belum melakukan pembenahan dan pengawasan secara menyeluruh.
- PT Pusri sebagai penanggungjawab sebagai koodinator ke 6 pabrik pupuk dalam pendistribusian pupuknya menghadapi beberapa hambatan di lapangan. Demikian pula KUD penyalur dan KUD Pengecer di beberapa daerah mengalami kesulitan pula karena birokrasi yang panjang.
- Dalam pendistribusian pada lini III, sangat sulit mengkoordinasikan sekitar 3.500 buah KUD dalam menetapkan jumlah kebutuhan pupuk yang diperlukan petani. Pada lini ini, pendistribusian merupakan titik rawan, karena distribusi dipecah dan menjadi rebutan sedikitnya 6 BUMN di 27 propinsi, Puskud di 11 propinsi, dan 37 perusahaan swasta di 11 propinsi. Rawannya lini III ini karena kemungkinan terjadinya permainan jual beli jatah pupuk kepada pihak swasta, sehingga KUD sering dipersalahkan dalam pendistribusian pupuk, yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan pupuk.
- KUD dapat saja dipersalahkan sebagai penyebab kelangkaan pupuk, karena lambat dalam menebus pupuk yang tersedia di gudang, namun hal ini lebih disebabkan oleh sulitnya KUD memperoleh pupuk dari gudang lini III yang pada realitanya sering tidak ada pada gudang propinsi .

II. Saran-Saran:

Sementara itu, saran-saran yang dikemukakan di sini adalah :

- Perlu koordinasi yang lebih terbuka antara PT Pusri dan lembaga distribusi pupuk dibawahnya agar informasi tingkat kebutuhan dapat terpantau dan diawasi dengan lebih ketat terutama pada lini III. Hal ini dapat dilakukan dengan hubungan dan pembinaan dan koordinasi dalam menciptakan sistim distribusi pupuk yang terpadu agar persediaan pupuk benar-benar terjamin.
- Pelaksanaan pendistribusian pupuk perlu ditangani dengan meningkatkan peran lembaga seperti KUD yang anggotanya adalah para petani sebagai pengguna akhir pupuk, sehingga bila pasokan langka pada tingkat KUD mereka akan langsung memberi Informasi pada Lini II dan III. Kapan musim tanamnya, dan rencana kebutuhan pupuknya.
- Untuk lebih efisien dalam penyaluran dari pabrik pupuk, sebaiknya perlu lebih mempersingkat jalur distribusi, yakni setiap pabrik mendistribusikan pupuk kedaerah yang terdekat disesuaikan dengan pembagian wilayah. Seperti Pabrik pupuk PT Pupuk Kujang dan PT Petrokimia Gresik, menyalurkan pupuknya langsung pada Wilayah A. Untuk Wilayah B. Tidak termasuk Sulawesi selatan, pupuknya akan disalurkan dari Pabrik PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwijaya. Sedangkan PT Pupuk Kaltim, akan memasok untuk wilayah C termasuk daerah Sulawesi Selatan. Jadi Setiap pabrik pupuk langsung mengkoordinir, menunjuk serta melibatkan KUD-KUD yang dibentuk oleh para petani dan bertanggung jawab menyalurkan pupuk langsung kepada petani.
- Perlu peningkatan sumber daya manusia yang berasal dari para petani dengan pelatihan secara bertahap dalam pengelolaan KUD, agar dapat lebih meningkatkan perannya terutama dalam menghadapi pasar bebas yang beberapa tahun lagi akan tiba.

Namun yang perlu kita perhatikan karena masalah yang paling mendasar adalah, kalau misalnya lembaga sosial atau ekonomi yang ada dimasyarakat tidak efisien seperti banyaknya penyelewengan, cara kerja yang lambat dan apatis, maka bagaimanapun sempurnanya kebijaksanaan yang kita tentukan di atas maka tidak akan "jalan" dan mencapai sasaran. Kebijakan apapun, baik jangka pendek maupun

jangka panjang harus dilaksanakan lewat lembaga sosial/ekonomi yang sudah ada, ibarat mengalirkan air jernih melalui pipa kotor, maka akan keluar air yang kotor pula. Ini merupakan suatu contoh lain di mana kebijaksanaan jangka pendek tidak bisa menyembuhkan penyakit "jangka pendek". Yang diperlukan adalah penyelesaian jangka panjang, yaitu dengan perombakan lembaga dan mental orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga tersebut.¹¹⁾

DAFTAR KEPUSTAKAAN :

ECONIT's PUBLIC POLICY REVIEW, "*Dampak Kelangkaan semu Pupuk Terhadap Impor Beras dan Kesejahteraan Petani Tahun 1996*", Jakarta Februari 1996.

DR. Boediono, "*Ekonomi Makro*", BPFE Yogyakarta, edisi ke VIII, 1990.

Philip Kotler, "*Manajemen Pemasaran, Analisis, perencanaan, Implementasi dan pengendalian*" Buku ke I, BAB. 6, Terjemahan oleh Ancella Anitawati Hermawan, Salemba Empat-Prentice Hall, Jakarta 1994.

Philip Kotler, "*Manajemen Pemasaran, Analisis, perencanaan, Implementasi dan pengendalian*" Buku ke II, BAB. 20, Menyeleksi dan mengelola saluran pemasaran, Terjemahan oleh Ancella Anitawati Hermawan, Salemba Empat-Prentice Hall, Jakarta 1994.

Winardi, "*Manajemen Pemasaran*", Cetakan I, Penerbit CV. Sinar Baru, Bandung, 1981.

Harian Suara pembaruan, 2 Mei 1996.